

Urgensi pengetahuan demokrasi dalam pembentukan sikap demokratis

Cici Frisiliawati ^{a,1}, Suyato ^{b,1}

^a Mahasiswa (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan pengetahuan demokrasi dengan sikap demokratis peserta didik di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang terdapat pengetahuan demokrasi yang tersirat di dalam materi demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah peserta didik di SMA Negeri 1 Prambanan baik kelas X, XI, dan XII yang berjumlah 739. Sampel dalam penelitian menggunakan teknik *random sampling*, yakni sampel dipilih secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 89 peserta didik ditentukan menggunakan rumus *Slovin*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes dan kuesioner (angket) yang telah diuji validitas dan reliabilitas sebelumnya. Analisis data dilakukan menggunakan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan uji linieritas. Pengujian hipotesis menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan bantuan *IBM SPSS Statistics 20*. Hasil analisis data penelitian ini dari 89 peserta didik yang diteliti tingkat pengetahuan demokrasi peserta didik dalam kategori sangat tinggi sebanyak 49 peserta didik (55.1%), kategori tinggi sebanyak 39 peserta didik (43.8%), dan kategori rendah sebanyak 1 peserta didik (1.1%). Sedangkan skor sikap demokratis dalam kategori sangat tinggi sebanyak 44 peserta didik (49.4%) serta kategori tinggi sebanyak 45 peserta didik (50.6%). Hasil analisis statistik menunjukkan nilai r -hitung (0.710) > r -tabel (0.206), dan signifikansi (0.000) < 0.05, apabila nilai tersebut diinterpretasikan maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pengetahuan demokrasi dengan sikap demokratis di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman

ABSTRACT

This study aims to understand the relationship between knowledge of democracy with the democratic attitudes of students at SMA Negeri 1 Prambanan Sleman. Pancasila Education and Citizenship (PPKn) are subjects that have knowledge of democracy implied in the material of democracy. This study uses quantitative research design correlations. This research population is students at SMA Negeri 1 Prambanan from class X, XI, and XII which amounted or totally to 739. The sample in this study was taken by random sampling technique, that is the sample is selected randomly without observe strata in the population research. Samples in this study there are amount 89 students were determined using the Slovin formula. Technique Data collection used in this study is using tests and questionnaires which has been tested for validity and reliability before. Data analysis performed using analysis prerequisite test which includes normality test and linearity test. Test hypothesis using the product moment correlation technique with the help of IBM SPSS Statistics 20. The results in this study data analysis of 89 students who studied the level of knowledge student democracy in the very high category as many as 49 students (55.1%), the category high as many as 39 students (43.8%), and the low category as many as 1 student (1.1%). While the scores of democratic attitudes in the very high category were 44 students (49.4%) and the high category as many as 45 students (50.6%). The results of statistical analysis show the value of r -count (0.710) > r -table (0.206), and significance (0.000) < 0.05, if that value interpreted then H_0 is rejected and H_a is accepted. It can be concluded that there is a relationship significant and positive relationship between knowledge of democracy and democratic attitudes in public high schools 1 Prambanan Sleman.

Sejarah Artikel

Diterima : 20 September 2022

Disetujui : 28 September 2022

Kata kunci:

Pengetahuan demokrasi, sikap demokratis, pendidikan

Keywords:

Knowledge of democracy, democratic attitudes, education

Pendahuluan

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yakni negara yang kehidupannya ditentukan oleh rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan umum yang bebas. Haudi (2021) demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat itu sendiri (hal. 25). Dapat dikatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan oleh mereka yang diberikan wewenang, yang kemudian terlahirlah legitimasi pemerintah dimana kemauan rakyat yang memilih dan mengontrol pemerintahan. Adanya sistem demokrasi ini, diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang kuat mengingat pemerintahan ini dibuat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang memegang kekuasaan secara penuh dan mampu mengarahkan kehendaknya kepada rakyat atau otoriter, namun pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang didukung sepenuhnya oleh rakyat tanpa ditumpangi oleh kepentingan lainnya. Demokrasi bukan hanya sebuah sistem pemerintahan saja, tetapi demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup yang mencerminkan perlunya toleransi dan partisipasi warga negara yang dapat mengembangkan kebebasan dan kesamaan. Cholisin & Nasiwan (2012) terwujudnya kebebasan dan kesamaan akan mengembangkan kehidupan yang demokratis (hal. 88). Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi digunakan sebagai acuan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Di dalam suatu masyarakat yang tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi maka akan membentuk masyarakat yang demokratis.

Pengetahuan mengenai demokrasi akan mewujudkan kehidupan demokrasi, serta pengetahuan mengenai demokrasi akan mendorong orang agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam demokrasi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih unggul berkualitas, unggul, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pendidikan nasional bertujuan:

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan nasional yakni menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Seseorang warga negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan hak-kewajibannya sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang strategi untuk menanamkan sikap demokratis, hal ini dikarenakan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dapat direncanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai dan sikap demokratis. Sejalan dengan pendapat Hasoloan dkk (2016), pendidikan demokrasi dapat dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah bukanlah semata-mata untuk pendidikan intelektual, melainkan juga untuk mengembangkan sikap demokratis, membentuk anggota masyarakat yang bertanggung jawab, dapat memanfaatkan kemampuan akalnya di dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.

Suryatni (2019) setiap pemerintahan demokrasi akan melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda, melalui pendidikan demokrasi dengan menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi agar dapat diimplementasikan dalam

kehidupannya dan sudah menjadi kebiasaan tanpa ada tekanan dari siapapun. Pendidikan Demokrasi bagi generasi muda di Indonesia sangat penting karena dengan adanya pendidikan demokrasi bisa menjadi salah satu cara untuk mencetak generasi muda yang cerdas dan memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam membangun demokrasi. Selaras dengan pendapat Abbas & Djurumudi (2021) salah satu peluang dalam mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia ialah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) karena pada jenjang inilah upaya strategis untuk menyemaikan demokrasi bisa terwujud. Pada usia ini mudah untuk menanamkan konsep tentang berbagai hal baru, termasuk pendidikan demokrasi. Hal ini menjadi penting agar kelak mereka memiliki bekal pengetahuan demokrasi dimana demokrasi sebagai konsep yang makna serta sikap perilaku tergolong demokratis. Lebih lanjut Damaresti & Harmanto (2018: 4) menyatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan suatu kegiatan seorang pendidik dalam membimbing peserta didik berdemokrasi dengan mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi sehingga diharapkan dapat menciptakan perilaku yang demokratis.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah sekaligus sebagai sarana pendidikan demokrasi. Keadaan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shelina dkk (2019) menyebutkan bahwa pembelajaran PPKn berperan dalam membentuk sikap demokratis pada peserta didik, seperti mengamalkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, berani dalam mengemukakan pendapat dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Hamisa & Murdiyono (2018) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dirumuskan secara luas mencakup proses generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya yakni menjadikan warga negara yang baik atau demokratis (hal. 97). Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam mengajarkan warga negaranya untuk bersikap aktif. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik dan demokratis.

Dalam kurikulum 2013 mengindikasikan bahwa kompetensi yang harus dimiliki peserta didik dibedakan menjadi 4 yaitu kompetensi inti sikap religius (KI 1), kompetensi inti sikap sosial (KI 2), kompetensi inti pengetahuan (KI 3), dan kompetensi inti keterampilan (KI 4). Kusumaning (2020) kompetensi pengetahuan disebut juga kompetensi kognitif, yang dalam penerapan pembelajaran kompetensi ini dimaksudkan sebagai kemampuan peserta didik meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah khususnya pada jenjang Sekolah menengah Atas (SMA) kelas XI menyebutkan bahwa dalam mata pelajaran PPKn terdapat materi yang memiliki muatan demokrasi yang tertuang dalam KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 tentang mengkaji sistem dan dinamika demokrasi pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 pada kelas XI SMA/SMK yang terdapat muatan materi demokrasi tersebut apakah peserta didik dapat secara maksimal memahami arti demokrasi sehingga peserta didik mengamalkan nilai-nilai demokrasi dan bersikap demokratis. Hal senada diperkuat oleh Ulfa dkk (2018) melalui pembelajaran PPKn peserta didik diharapkan mampu untuk mengembangkan sikap demokratis. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya sekedar mendidik peserta didik menjadi tahu tentang demokrasi melainkan belajar dan berlatih untuk mempraktikkan atau bersikap secara demokratis.

Menurut Baharun dan Mahmudah yang dikutip oleh Na'imah dan Bawani (2021) tanpa sikap demokratis ini, akan muncul pola kehidupan yang saling memaksa, tidak saling menghormati hak dan kewajiban setiap orang, dan mementingkan kepentingan diri sendiri. Dapat dikatakan bahwa sikap demokratis sangat penting dimiliki oleh setiap orang, karena sikap demokratis mengandung sikap saling memahami, menghormati, toleransi terhadap sesama terutama terkait dengan hak dan

kewajiban. Lebih lanjut Abbas & Djurumudi (2021) seharusnya pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), siswa harus sudah memiliki sikap demokratis dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bahwa negara ini merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Dapat dikatakan materi demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan demokrasi dengan tujuan membentuk sikap demokratis, sehingga pengetahuan yang dimiliki seseorang akan menimbulkan kesadaran, dan akhirnya akan menyebabkan seseorang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Melalui pembelajaran PPKn akan memberikan pengetahuan materi demokrasi kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat bersikap demokratis.

Hasil penelitian terdahulu, Nurdin & Insan (2020) mengkaji Pendidikan Demokrasi pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (Studi Pada Pemilihan Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Sinjai) menemukan bahwa dari proses pemahaman demokrasi yang siswa dapat melalui pendidikan formal yang tertera dalam pelajaran PPKn tentang arti demokrasi masih belum menunjukkan hal yang memuaskan hal ini terlihat dalam kegiatan pemilihan OSIS siswa hanya partisipasi yang menunjukkan kewajiban/keharusan bukan partisipasi yang menunjukkan hak mereka sebagai warga negara.

Adapun Sadeli & Wati (2013) dalam penelitiannya menyatakan kendala-kendala dalam proses pembelajaran konsep demokrasi adalah keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki siswa berpengaruh terhadap sikap demokratis siswa. Dari kedua riset tersebut membuktikan bahwa pengetahuan demokrasi yang diajarkan di sekolah menengah atas belum tersampaikan dengan baik sehingga hal ini juga akan berdampak pada sikap demokratis peserta didik.

Berdasarkan nilai rapor peserta didik semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diketahui semua peserta didik memperoleh nilai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yakni 70. Dari data nilai rapor tersebut dapat dikatakan bahwa peserta didik SMA N 1 Prambanan Sleman memiliki pengetahuan yang baik mengenai materi PPKn. Nilai rapor PPKn ini di dalamnya terdapat juga pengetahuan tentang demokrasi sehingga dapat sebagai tolok ukur pengetahuan demokrasi peserta didik. Seperti yang dikatakan oleh Zulviah (2021) pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik dengan pengetahuan yang baik akan memiliki sikap yang baik pula. Sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh Ravitch bahwa pengetahuan tentang demokrasi juga mempengaruhi perilaku demokrasi (Budiman, 2019).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru mata pelajaran PPKn pada bulan Juli sampai dengan Desember 2021 yang bersamaan dengan program kampus yakni Praktik Kependidikan (PK) di SMA N 1 Prambanan Sleman. Dilansir dari [Kompas.com](https://www.kompas.com) yang menyatakan bahwa SMA N 1 Prambanan Sleman merupakan salah satu SMA terbaik di Sleman dinilai dari hasil nilai UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) 2021 (Ihsan, 2021). Dari hasil observasi terdapat beberapa masalah yang peneliti temui pada peserta didik yang berkaitan dengan sikap demokratis. Contohnya dalam pemilihan ketua OSIS banyak peserta didik yang kurang peduli, bahkan ada peserta didik yang tidak mengetahui siapa saja calon ketua OSIS nya. Contoh lainnya peserta didik belum mencerminkan sikap demokratis seperti kurangnya partisipasi peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung, ketika diberi pertanyaan oleh guru peserta didik cenderung diam dan tidak mau mengeluarkan pendapatnya, masih ada peserta didik yang mengabaikan guru saat menjelaskan materi dan masih banyak peserta didik yang terlambat atau bahkan tidak mengumpulkan tugas sehingga mengakibatkan hilangnya rasa menghormati dan menghargai guru. Bahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib banyak peserta didik yang tidak hadir.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan ditambah dengan realita yang terjadi dalam pembelajaran PPKn yang berlangsung di kelas guru hanya menekankan pada aspek pengetahuan (*knowledge*) saja. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmawati dkk (2016: 308) yang menyatakan faktor penghambat guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya membangun

kecerdasan berdemokrasi pada peserta didik yakni materi pendidikan kewarganegaraan yang banyak sehingga guru hanya fokus pada *transfer knowledge*.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah metode korelasional. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik di SMAN 1 Prambanan Sleman baik MIPA maupun IPS dengan populasi berjumlah 739 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* dengan rumus Slovin sebanyak 89 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes mengenai pengetahuan demokrasi. Tes yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan demokrasi peserta didik. Bentuk tes dalam penelitian ini adalah berbentuk pilihan ganda. Sedangkan untuk mengukur sikap demokratis peserta didik menggunakan angket pernyataan dengan *skala likert* yang berjumlah 30 butir pernyataan positif. Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai variabel pengetahuan demokrasi dan variabel sikap demokratis. Dalam penelitian ini, Perhitungan analisis deskriptif pemusatan data dibantu dengan program aplikasi IBM SPSS versi 20.
2. Uji Prasyarat Analisis
 - 1) Uji Normalitas
 - 2) Uji Linieritas
3. Analisis Akhir (Pengujian Hipotesis)
Setelah memenuhi uji normalitas dan uji *linieritas*, maka peneliti dapat melanjutkan dengan melakukan pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini peneliti menggunakan analisis *bivariat*. Analisis *bivariat* ini digunakan untuk mengetahui hubungan pengetahuan demokrasi dengan sikap demokratis peserta didik. Analisis *bivariat* yang digunakan yaitu dengan teknik korelasi menggunakan Korelasi *Product Moment*.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Statistik Deskriptif

Data mengenai pengetahuan demokrasi peserta didik SMA N 1 Prambanan Sleman diperoleh dengan memberikan tes kepada peserta didik SMA N 1 Prambanan kelas X, XI, dan XII baik putra maupun putri. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 peserta didik. Dengan sebaran data sebagai berikut.

Tabel 3
Kategori Pengetahuan Demokrasi

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sedang	1	1.1%
Tinggi	39	43.8%
Sangat Tinggi	49	55.1%
Total	89	100%

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan demokrasi peserta didik SMA N 1 Prambanan Sleman dari 89 sampel yang diambil, sebanyak 49 peserta didik (55.1%) dengan kategori sangat tinggi, sebanyak 39 peserta didik (43.8%) dengan kategori tinggi, dan sebanyak 1 peserta didik (1.1%) dengan kategori rendah. Dengan sebaran data pengetahuan demokrasi di setiap jenjang kelas sebagai berikut.

Tabel 4
Perbandingan Pengetahuan Demokrasi berdasarkan Jenjang Kelas

Kelas	Rata-rata	Jumlah
X	79.31	29
XI	79.05	40
XII	79.52	20
Total		89

Berdasarkan data di atas dapat diartikan bahwa dari 89 responden ada 29 responden dari kelas X dengan rata-rata nilai pengetahuan demokrasi sebesar 79,31; 40 orang responden dari kelas XI dengan rata-rata nilai pengetahuan demokrasi sebesar 79,05; dan 20 orang responden dari kelas XII dengan rata-rata nilai pengetahuan demokrasi sebesar 79,52. Dapat dikatakan bahwa untuk peserta didik di SMA N 1 Prambanan Sleman yang memiliki rata-rata nilai pengetahuan tertinggi adalah peserta didik pada jenjang kelas XII dan untuk peserta didik yang memiliki pengetahuan demokrasi terendah adalah pada jenjang kelas XI. Sedangkan perbandingan pengetahuan demokrasi berdasarkan jenis kelamin ada 32 responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata nilai pengetahuan demokrasi sebesar 79,61 dan 57 responden yang berjenis kelamin perempuan dengan rata-rata nilai pengetahuan demokrasi sebesar 79,03. Dapat dikatakan bahwa peserta didik yang memiliki rata-rata nilai pengetahuan tertinggi adalah peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki. Data perbandingan pengetahuan demokrasi berdasarkan jenis kelamin ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Perbandingan Pengetahuan Demokrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Rata-rata	Jumlah
Laki-laki	79.61	32
Perempuan	79.03	57
Total		89

Sedangkan data mengenai sikap demokratis peserta didik SMA N 1 Prambanan Sleman diperoleh dengan memberikan angket pernyataan kepada peserta didik SMA N 1 Prambanan kelas X, XI, dan XII baik putra maupun putri. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 peserta didik. Dengan sebaran data sebagai berikut

Tabel 6
Kategori Sikap Demokratis

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tinggi	45	50.6%
Sangat Tinggi	44	49.4%
Total	89	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sikap demokratis peserta didik SMA N 1 Prambanan Sleman dari 89 sampel yang diambil sebanyak 44 peserta didik (49.4%) dengan kategori sangat tinggi dan sebanyak 45 peserta didik (50.6%) dengan kategori tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peserta didik di SMA N 1 Prambanan Sleman memiliki sikap demokratis yang baik. Dengan sebaran data sikap demokratis di setiap jenjang kelas sebagai berikut.

Tabel 7
Perbandingan Sikap Demokratis berdasarkan Jenjang Kelas

Kelas	Rata-rata	Jumlah
X	132	29
XI	127	40
XII	121	20
Total		89

Berdasarkan data di atas dapat diartikan bahwa dari 89 responden ada 29 responden dari kelas X dengan rata-rata skor sikap demokratis sebesar 132, 40 orang responden dari kelas XI dengan rata-rata skor sikap demokratis sebesar 127, dan 20 orang responden dari kelas XII dengan rata-rata skor sikap demokratis sebesar 121. Dapat dikatakan bahwa untuk peserta didik di SMA N 1 Prambanan Sleman yang memiliki skor sikap demokratis tertinggi adalah peserta didik pada jenjang kelas X dan untuk peserta didik yang memiliki skor sikap demokratis terendah adalah pada jenjang kelas XII. Selanjutnya berikut ini adalah tabel perbandingan sikap demokratis berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 8
Perbandingan Sikap Demokratis berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Rata-rata	Jumlah
Laki-laki	128	32
Perempuan	127	57
Total		89

Berdasarkan data di atas dapat diartikan bahwa dari 89 responden ada 32 responden yang berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata skor sikap demokratis sebesar 128 dan 57 responden yang berjenis kelamin perempuan dengan rata-rata skor sikap demokratis sebesar 127. Dapat dikatakan bahwa peserta didik yang memiliki rata-rata skor sikap demokratis tertinggi adalah peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki.

2. Uji Prasyarat Analisis

1) Uji Normalitas

Berdasarkan hasil dari uji normalitas untuk pengetahuan demokrasi (variabel X) diperoleh nilai signifikansi = 0.902 dengan $n = 89$. Sehingga nilai signifikansi $0.902 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan berdistribusi normal. Sedangkan untuk sikap demokratis peserta didik (variabel Y) diperoleh nilai signifikansi = 0.904 dengan $n = 89$. Sehingga nilai signifikansi $0.904 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa sikap demokratis peserta didik berdistribusi normal.

Tabel 1
Uji Normalitas

Variabel	N	Signifikansi	Kesimpulan
Pengetahuan Demokrasi	89	0.092	Normal
Sikap Demokratis	89	0.904	Normal

2) Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan linear atau tidaknya dari dua buah variabel yang sedang diteliti. Suatu variabel dikatakan memiliki hubungan yang linear dengan melihat signifikansi atau *Linearity* pada *ANOVA table*, jika nilai *signifikansi* kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan linier secara *signifikan*, apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan linier secara signifikan.

Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas yang dilakukan menggunakan aplikasi *IBM SPSS Statistics 20* dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05 dengan *Linearity* $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdapat hubungan linier secara signifikan antara pengetahuan demokrasi dengan sikap demokratis. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Uji Linieritas

Variabel	N	Signifikansi	Kesimpulan
Pengetahuan Demokrasi	89	0.000	Linear
Sikap Demokratis	89	0.000	Linear

3. Uji Hipotesis

Tabel 9
Uji Hipotesis

Variabel	N	Signifikansi	r-hitung	r-tabel
Pengetahuan Demokrasi Sikap Demokratis	89	0.000	0.710	0.206

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan bantuan aplikasi *IBM SPSS v20* menggambarkan koefisien korelasi pengetahuan demokrasi dengan sikap demokratis sebesar 0.710 pada tingkat signifikansi 0.000. Dengan r-hitung yang bernilai positif berarti semakin tinggi pengetahuan demokrasi maka sikap demokratis peserta didik akan semakin baik, atau semakin rendah pengetahuan demokrasi maka sikap demokratis akan semakin buruk. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai r-hitung ($0.710 > r\text{-tabel}$ (0.206), dan signifikansi ($0.000 < 0.05$). Hal tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian bahwa pengetahuan demokrasi memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap demokratis di SMA N 1 Prambanan Sleman diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan demokrasi sangat berhubungan dengan sikap demokratis peserta didik di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman. Peserta didik akan memiliki sikap demokratis yang baik apabila memiliki pengetahuan demokrasi yang bias didapat melalui materi dalam pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu pengetahuan demokrasi sangat penting diajarkan kepada peserta didik karena hal tersebut memiliki pengaruh terhadap sikap demokratis peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Zamroni (Ubaedillah, 2016) yang mengatakan bahwa mata pelajaran PPKn merupakan pendidikan demokrasi yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan warga negara yang bisa berpikir kritis serta juga bertindak demokratis. Lebih lanjut Rosmawati & Mulkan (2021) mengatakan bahwa hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam mata pelajaran PPKn dan isi materi berkenaan dengan kajian atau apa saja yang layak dari pendidikan demokrasi (hal. 111).

Berdasarkan pendapat di atas dikatakan bahwa peserta didik harus memiliki sikap demokrasi, sehingga penting untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai pengetahuan demokrasi agar tercipta masyarakat yang memiliki pengetahuan dan sikap dengan demikian akan

menjadi warga negara yang baik serta menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu mata pelajaran yang di dalamnya terdapat pengetahuan demokrasi adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pembelajaran konsep demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat tergambarkan pada materi pokok prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya pengetahuan demokrasi yang tersirat dalam mata pelajaran PPKn diharapkan peserta didik dapat menerapkannya dalam berbagai kegiatan sehari-hari dengan pengetahuan yang diperolehnya.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar peserta didik SMA N 1 Prambanan Sleman memiliki pengetahuan demokrasi yang baik. Dengan pengetahuan yang baik peserta didik mengenai demokrasi tentunya merupakan hal yang positif bagi SMA N 1 Prambanan Sleman, karena dengan pengetahuan yang baik ini diharapkan peserta didik dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun juga perlu diperhatikan masih terdapat siswa yang memiliki tingkat pengetahuan demokrasi dengan kategori sedang. Adanya peserta didik yang memiliki pengetahuan demokrasi sedang, tentunya harus segera ditangani karena sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki pengetahuan mengenai demokrasi agar kelak menjadi warga negara yang baik. Sesuai dengan pendapat Arifin (2021) Pendidikan Kewarganegaraan selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga dapat membentuk sikap demokratis. Peserta didik yang pada awalnya belum memiliki pengetahuan demokrasi dengan adanya materi demokrasi yang ada dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan memiliki pengetahuan demokrasi dan secara tidak langsung akan membentuk sikap demokratis yang sesuai dengan nilai dan prinsip demokrasi serta diterapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu memberikan pengetahuan demokrasi sejak dini sangatlah penting bagi peserta didik, dengan adanya pelajaran PPKn yang di dalamnya termuat materi demokrasi dianggap sebagai sumber pengetahuan demokrasi yang akan memberikan dampak positif dalam terbentuknya sikap demokratis. Lebih lanjut Abbas & Djurumudi (2021) mengatakan bahwa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk sikap demokratis peserta didik. Hal ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Shelina dkk (2019) yang menyatakan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang penting dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan *civics disposition* siswa di SMA Negeri 4 Kotabumi.

Sedangkan untuk sikap demokratis mayoritas peserta didik di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman memiliki sikap demokratis yang baik. Dengan sikap demokratis yang baik tentunya ini merupakan hal yang positif dan patut untuk dibanggakan bagi SMA Negeri 1 Prambanan Sleman, karena dengan sikap demokratis yang baik diharapkan peserta didik dapat mengamalkan sikap demokratis di dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkup masyarakat, bangsa maupun negara. Sesuai dengan pendapat Rahmawati (2022) yang mengatakan bahwa komponen sikap terdiri dari kognisi dimana kognisi ini berkaitan dengan perspektif, pengetahuan, dan keyakinan individu terhadap objek sikap. Terlihat dari data pengetahuan demokrasi dan sikap demokratis dimana pengetahuan demokrasi peserta didik di SMA Negeri 1 Prambanan Sleman memiliki pengetahuan yang baik sehingga berdampak positif kepada sikap demokratis peserta didik.

Pentingnya memberikan Pengetahuan demokrasi kepada peserta didik dengan harapan agar penanaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi dapat tersampaikan kepada peserta didik sehingga peserta didik memiliki pengetahuan dan sikap yang menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian sikap demokratis yang terbentuk dalam diri peserta didik tidak terlepas dari peran penting dari materi demokrasi dalam pembelajaran

PPKn yang memberikan pengetahuan demokrasi kepada peserta didik agar terciptanya warga negara yang baik dan demokratis. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurdiyah dkk (2021) yang menyebutkan bahwa dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pengetahuan kewarganegaraan dapat membekali siswa agar menjadi warga negara yang demokratis dan warga negara yang baik (*good citizen*) yakni warga negara yang berperan aktif serta bertanggung jawab bagi pemerintah maupun untuk dirinya sendiri. Tentunya ini selaras dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang tercantum di dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan bahwa PPKn bertujuan agar peserta didik berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.

Dapat dikatakan apabila pengetahuan demokrasi yang dilakukan di sekolah ini belum tersampaikan dengan baik kepada peserta didik maka hal ini juga akan berdampak langsung pada sikap demokratis peserta didik. Dengan demikian apabila pengetahuan demokrasi yang dilakukan di sekolah ini belum tersampaikan dengan baik kepada peserta didik maka hal ini juga akan berdampak langsung pada sikap demokratis peserta didik. Sikap demokrasi adalah kecenderungan seseorang dalam berperilaku atau bertindak berdasarkan demokrasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi. Namun pada kenyataannya implementasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi masih terdapat hambatan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi nilai-nilai demokrasi terjadi karena 2 faktor yakni internal dari peserta didik sendiri dan faktor eksternal yaitu di luar diri peserta didik. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmini dkk (2021) yang menyatakan bahwa faktor penghambat implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah faktor dalam diri peserta didik, pengaruh lingkungan dan kurang perhatian dari orang tua.

Berdasarkan penjelasan di atas mata pelajaran PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib dan penting untuk diajarkan di seluruh jenjang pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam mata pelajaran PPKn sendiri memuat materi mengenai pendidikan demokrasi yang memberikan pengetahuan mengenai demokrasi yang khusus diajarkan kepada peserta didik di sekolah. Dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peserta didik dapat mempelajari dan juga menerapkan prinsip dan nilai demokrasi dalam kegiatan belajar di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan mewujudkan masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sikap demokratis peserta didik akan terbentuk apabila peserta didik memiliki pengetahuan demokrasi yang baik. Selaras dengan pendapat Ravitch bahwa pengetahuan tentang demokrasi juga mempengaruhi perilaku demokrasi (Budiman, 2019). Pengetahuan demokrasi ini diberikan melalui pelajaran yang ada dalam persekolahan khususnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang di dalamnya termuat materi demokrasi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara pengetahuan demokrasi dengan sikap demokratis peserta didik di SMA N 1 Prambanan Sleman. Hal ini dibuktikan dengan r -hitung (0.738) > r -tabel (0.2601) dan $0.000 < 0.05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima, yang berarti terdapat hubungan antara pengetahuan demokrasi dengan sikap demokratis di SMA N 1 Prambanan Sleman.

Dengan r-hitung yang bernilai positif berarti semakin tinggi pengetahuan demokrasi maka sikap demokratis peserta didik akan semakin baik, atau semakin rendah pengetahuan demokrasi maka sikap demokratis akan semakin buruk. Dari 89 peserta didik yang diteliti tingkat pengetahuan demokrasi peserta didik dalam kategori sangat tinggi sebanyak 49 peserta didik (55.1%), kategori tinggi sebanyak 39 peserta didik (43.8%), dan kategori rendah sebanyak 1 peserta didik (1.1%). Sedangkan skor sikap demokratis dalam kategori sangat tinggi sebanyak 44 peserta didik (49.4%) serta kategori tinggi sebanyak 45 peserta didik (50.6%). Berdasarkan hal tersebut disarankan bagi peneliti selanjutnya variabel yang digunakan untuk meneliti sikap demokratis dapat menambah variabel lainnya yang berhubungan dengan sikap demokratis. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang memiliki hubungan selain pengetahuan demokrasi.

Referensi

Abbas, I., & Djurumudi, A. (2021). Sikap Demokrasi Dalam Pembelajaran PPKN Di Smk Negeri 2 Kota Ternate. *Jurnal Geocivic*, 3(2).

DOI: <http://dx.doi.org/10.33387/geocivic.v3i2.2672>

Arifin, A. (2021). Persepsi Siswa Terhadap Konsep Demokrasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Research and Development Journal of Education*, 7(1), 226-234.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30998/rdje.v7i1.12582>

Budiman, A. (2019). Pengaruh Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Sikap Demokratis Mahasiswa Tingkat II Pendidikan Sejarah Unigal Ciamis Tahun Ajaran 2013/2014. *Jurnal Artefak*, 3(1), 29-34.

DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v3i1.1107>

Cholisin, & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Damaresti, M. & Harmanto (2018). Strategi sekolah dalam menerapkan pendidikan demokrasi sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila (Studi pada SMAN 1 Kertosono). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2), 686-700.

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/25394>

Hamisa, W., & Murdiyono, M. (2018). Peran PKn sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi siswa dalam organisasi di SMA. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(2), 192-201.

DOI: <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i2.11205>

Haudi. (2021). *Pengantar ilmu pemerintahan*. Sumatera Barat: CV Insan Cendekia Mandiri.

Hasoloan, J. dkk. (2016). *Pancasila dan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Ihsan, D. (20 Oktober 2021). 15 SMA terbaik di Sleman berdasarkan nilai UTBK 2021. Diambil pada tanggal 3 Maret 2022, dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/10/20/070600371/15-sma-terbaik-di-sleman-berdasarkan-nilai-utbk-2021?page=all>.

Kusumaningsih, D. (2020). Model pembelajaran kepenyiaran radio penggunaan dan perkembangan radio internet. Bantul: Pohon Cahaya.

Na'imah, I., & Bawani, I. (2021). Penanaman Pendidikan Karakter Demokratis Di Pondok Pesantren. *Jurnal Muara Pendidikan*, 6(2), 228-236.

DOI: <https://doi.org/10.52060/mp.v6i2.604>

Nurdin, M., & Insan, K. (2020). Pendidikan Demokrasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (Studi Pada Pemilihan Ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Sinjai). *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 32-51.

<https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/79>

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Rahmawati, I. (2022). *Pengantar psikologi sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rohmawati, R., & Muchtarom, M. (2016). Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara. *PKn Progresif*, 11(1). <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/progresif/article/view/9727/7181>
- Rosmawati & Mulkan, H. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media
- Rukmini, B. S., & Hidayati, Y, N. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dewantara: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 7(1), 40-47. <https://jurnal.stkipgtritenggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/view/102>
- Sadeli, E. H., & Wati, R. K. (2013). Peranan Pembelajaran Konsep Demokrasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Sikap Demokratis Siswa. *Sainteks*, 10(1). DOI: [10.30595/sainteks.v10i1.219](https://doi.org/10.30595/sainteks.v10i1.219)
- Shelina, N dkk. (2019). Peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan civic disposition siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(2), 1-13. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/19176>
- Suryatni, L. (2019). Literasi Media dan Pendidikan Demokrasi Dalam Masyarakat Informasi. *JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 6(1), 64-75. DOI: <https://doi.org/10.35968/jsi.v6i1.276>
- Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ulfa, R. A., Prasetyo, D., & Marzuki, M. (2018). Pengaruh model PBM dalam pembelajaran PPKn terhadap kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 125-139. DOI: <http://doi.org/10.25273/citizenship.v6i2.3307>
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zulviah, R. C. (2021). Implementasi pendidikan karakter terhadap perilaku mahasiswa prodi PPKn di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. *Pelita Bumi Pertiwi*, 2(02), 1-7. <https://jurnal.upg.ac.id/index.php/jpbp/article/view/124>

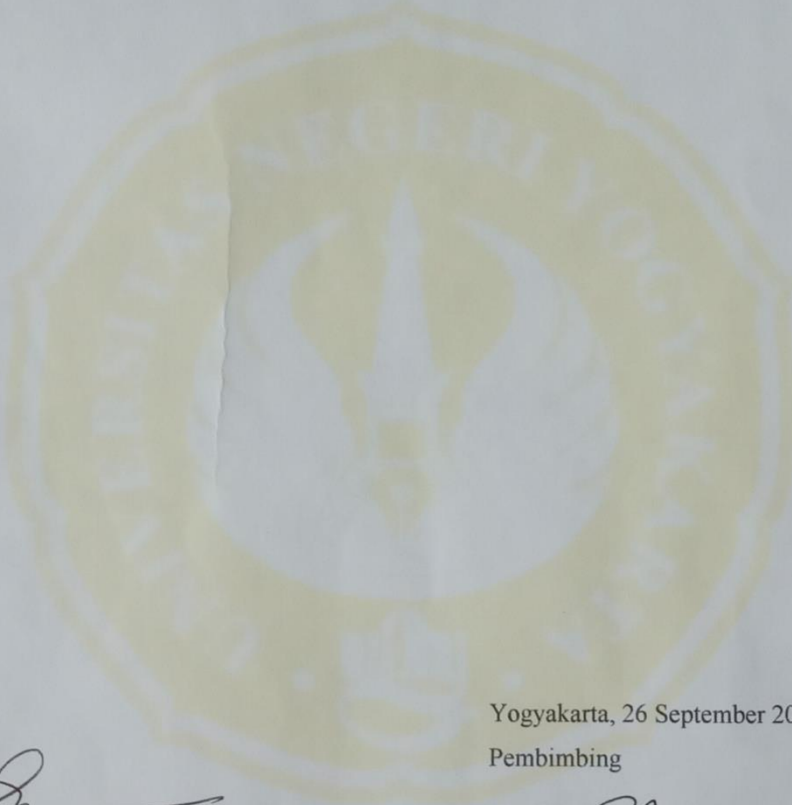
LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Urgensi Pengetahuan Demokrasi dalam Pembentukan Sikap Demokratis

Nama : Cici Frisiliawati

NIM : 18401244008

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 26 September 2022

Pembimbing

Reviewer

28/9-2022

Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197206192002121001

Dr. Suyato, M.Pd.
NIP. 196706161994031002

Korespondensi: Cici Frisiliawati, cicifrisiliawati.2018@student.uny.ac.id , Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
Copyright © tahun. Nama Penulis. All Right Reserved